



DINAMIKA GOVERNANCE JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

DOI:

<http://ejournal.unpwtim.ac.id/index.php/jdg/article/view/4113>

PERAN *COMMUNITY FEEDING CENTER* (CFC) DALAM PENANGGULANGAN *STUNTING* DI DESA WINDUAJI KECAMATAN PAGUYANGAN KABUPATEN BREBES TAHUN 2022

Aries Amanda¹, Chamid Sutikno², Amindiyah³

Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto^{1,2,3}

c.sutikno@unupurwokerto.ac.id¹, a.amanda@unupurwokerto.ac.id²

ARTICLE INFORMATION

Article history:

Received date: 17 Oktober 2023

Revised date: 15 November 2023

Accepted date: 14 November 2023

ABSTRACT

This research discusses the role of the Community Feeding Center (CFC) in preventing stunting in Winduaji Village, Paguyangan District, Brebes Regency. Stunting is a health problem in Indonesia that has become a national program and is still being improved today. Stunting is an indicator of the success of community welfare, including education and income. This Healthy Indonesia mission can be realized with efforts and collaboration from government, community and private elements. Comprehensive health development is carried out according to general local conditions and specifically according to a socio-cultural approach. Based on the 2021 SSGI results report, Brebes Regency has a stunting prevalence rate of 26.3%, which is in the top 3 highest prevalence rates after Wonosobo Regency and Tegal Regency. The total number of stunting incidents in Winduaji Village, Paguyangan District, Brebes Regency is still high at 138 cases in 2021. The aim of this research is to analyze and evaluate stunting prevention policies through the role of the Community Feeding Center (CFC) in Winduaji Village, Paguyangan District, Brebes Regency in 2022. This research is qualitative research using the data triangulation method, namely observation, interviews and documentation studies. The informant selection technique used purposive sampling targeting parties involved in the stunting reduction program in Winduaji Village, Paguyangan District, Brebes Regency. These parties are elements of the Village Health Forum (FKD), Healthy Village House (RDS), Community Feeding Center (CFC), and Family Assistance Team (TPK) and the Winduaji Village community. The results of this research also discuss the role of the Community Feeding Center from a collaborative approach involving various stakeholders

Keywords: Community Feeding Center (CFC), Collaborative Approach, Stunting Prevention

ABSTRAKSI

Penelitian ini membahas mengenai Peran *Community Feeding Center* (CFC) Dalam Penanggulangan *Stunting* Di Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. *Stunting* merupakan salah satu masalah kesehatan di Indonesia yang menjadi program nasional dan masih terus diperbaiki hingga saat ini. *Stunting* menjadi salah satu indikator keberhasilan kesejahteraan masyarakat meliputi pendidikan dan juga pendapatan. Misi Indonesia Sehat ini bisa diwujudkan dengan upaya dan kolaborasi dari unsur pemerintah, masyarakat dan swasta. Pembangunan kesehatan secara komprehensif dilakukan sesuai keadaan lokal secara umum dan spesifik sesuai pendekatan sosial budaya. Berdasarkan laporan Hasil SSGI tahun 2021, Kabupaten Brebes memiliki angka prevalensi penanganan *stunting* sebesar 26,3 %, masuk dalam 3 besar angka prevalensi tertinggi setelah Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Tegal. Jumlah keseluruhan kejadian *stunting* di Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes masih tinggi sebanyak 138 kasus pada tahun 2021. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mengevaluasi kebijakan penanggulangan *stunting* melalui Peran *Community Feeding Center* (CFC) di Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes Tahun 2022. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode triangulasi data yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling dengan sasaran pihak-pihak yang terlibat dalam program penanggulangan *stunting* di Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. Pihak-pihak tersebut adalah unsur Forum Kesehatan Desa (FKD), Rumah Desa Sehat (RDS), *Community Feeding Center* (CFC), dan

Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan masyarakat Desa Winduaji. Hasil penelitian ini juga membahas mengenai peran *Community Feeding Center* dari pendekatan *collaborative* yang melibatkan berbagai *stakeholders*.

Kata Kunci: *Community Feeding Center* (CFC), Pendekatan *Collaboartive*, Penanggulangan *Stunting*

PENDAHULUAN

Pembangunan sumberdaya manusia yang sehat menjadi prioritas bagi suatu negara. Pemerintah harus mampu membangun kebijakan yang komperhensif dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi bagi masyarakat. Saat ini pemerintah sedang berupaya dalam penanggulangan dan pencegahan gizi buruk bagi anak-anak yang berdampak pada kondisi *stunting*. Masalah gizi yang saat ini dialami di Indonesia dengan persentase tertinggi yaitu anak yang memiliki postur tubuh pendek dimana terjadi peningkatan pada tahun 2017. Postur tubuh pendek erat kaitannya dengan *stunting*. Balita pendek (*stunting*) adalah masalah gizi secara kronis yang disebabkan oleh asupan yang kurang dalam kurun waktuyang relatif lama biasanya asupan makanan tidak memenuhi kebutuhan gizi, dan keterlambatan perkembangan dimulai di dalam rahim dan terlihat ketika anak berusia dua tahun. *Stunting* merupakan salah satu masalah kesehatan di Indonesia yang menjadi program nasional dan masih terus diperbaiki hingga saat ini karena *Stunting* menjadi salah satu indikator keberhasilan kesejahteraan masyarakat meliputi pendidikan dan juga pendapatan. (Putri & Nurcahyanto, 2021). Misi Indonesia Sehat ini bisa diwujudkan dengan upaya dan kolaborasi dari unsur pemerintah, masyarakat dan swasta, adapun pembangunan kesehatan suatu sistem yang mengatur perilaku sosial dan individu dalam bidang Kesehatan pembangunan ini melibatkan pemerintah dan stakeholder, dalam mengimplementasikan kondisi kesehatan yang maksimal perlu optimalisasi pada sistem kesehatan.

Pembangunan kesehatan secara komprehensif dilakukan sesuai keadaan lokal secara umum dan spesifik sesuai pendekatan sosial budaya. Tata kelolanya pun perlu melibatkan seluruh komponen atau stakeholder kesehatan. (Haryono & Marlina, 2021). Kebijakan pencegahan *stunting* di Indonesia telah diatur dalam beberapa bentuk peraturan, yaitu seperti UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang terdapat pada pasal 141, 142, dan 143. Di dalam undang-undang ini

dijelaskan bahwa perbaikan gizi diarahkan kepada upaya memperbaiki pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang, meningkatkan kesadaran perilaku gizi, melakukan aktivitas fisik dan kesehatan, meningkatkan ketercapaian sarana dan mutu pelayanan gizi, peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi serta Upaya meningkatkan kerja sama pemerintah dan masyarakat dalam menjamin ketersediaan bahan makanan (Febrian & Yusran, 2021). Perpres No. 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Gernas PPG) juga mengatur tentang upaya dalam pencegahan *stunting* merupakan upaya pencegahan secara bersama. Pada pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa upaya percepatan perbaikan gizi dilakukan secara bersama pemerintah dan masyarakat.

Para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi untuk percepatan perbaikan gizi. Dari undang-undang dan peraturan presiden yang telah dijelaskan di atas terlihat bahwa adanya penekanan dalam upaya pelaksanaan pencegahan *stunting* di Indonesia, namun dalam penerapannya masih belum optimal dilaksanakan. Sehingga berdampak kepada angka prevalensi *stunting* di Indonesia yang fluktuatif dari tahun ke tahunnya (Febrian & Yusran, 2021).

Untuk memperkuat pedoman pencegahan *stunting* di Indonesia, maka pemerintah menetapkan dokumen Strategi Nasional Percepatan *Stunting* (Stranas *Stunting*) tahun 2018. Salah satu tujuan dokumen Strategi Nasional Percepatan *Stunting* ini adalah diaturnya tentang perlakuan multi sektoral sebagai salah satu upaya percepatan penurunan *stunting* (Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN, 2019:1). Karena selama ini salah satu penyebab terhambatnya pelaksanaan pencegahan *stunting* di Indonesia adalah belum optimalnya koordinasi antar lembaga pemerintah (TNP2K, 2018:5), dalam (Febrian & Yusran, 2021). Berikut ini adalah grafik prevalensi balita penderita *stunting* oleh SSGI tahun 2021.

Gambar 1. Prevalensi Balita Stunting Berdasarkan Provinsi, SGGI 2021



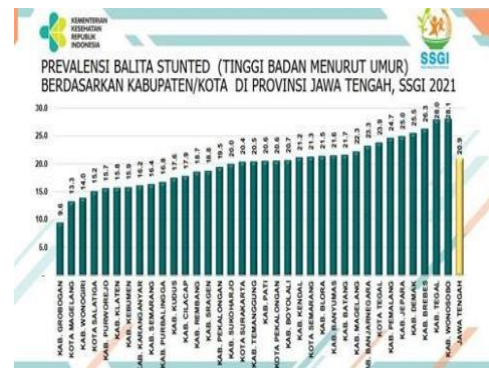
Sumber: Buku Saku Hasil SSGI, 2021

Berdasarkan hasil SSGI tahun 2021 angka stunting secara nasional mengalami penurunan sebesar 1,6 persen per tahun dari 27.7 persen tahun 2019 menjadi 24,4 persen tahun 2021. Hampir sebagian besar dari 34 provinsi menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2019 dan hanya 5 provinsi yang menunjukkan kenaikan. Provinsi Jawa Tengah memiliki prevalensi sebanyak 20.9% yang artinya Jawa tengah masih termasuk ke dalam 27 provinsi kategori Kronis-Akut (Stunted lebih sama dari 20% dan Wasted kurang sama dari 5%). Sedangkan provinsi yang dikategorikan baik yaitu , (Stunted < 20% dan Wasted <5%) adalah hanya Provinsi Bali. Selain itu lima provinsi dalam kategori akut (Stunted < 20% dan Wasted kurang sama dari 5%) adalah Lampung, Kep. Bangka Belitung, Kep. Riau, DKI Jakarta, dan DI Yogyakarta, serta satu provinsi termasuk kategori kronis (lebih sama dari 20% dan Wasted < 5%) adalah hanya Provinsi Bengkulu (Buku Saku SSGI, 2021). 27 Provinsi dengan masalah gizi Akut-Kronis mendapatkan rekomendasi berupa upaya kovergensi harus sudah mulai menuju kualitas intervensi berimbang di dua intervensi utama, yaitu intervensi spesifik dan intervensi sensitif (Buku Saku SSGI, 2021).

Kabupaten Brebes merupakan salah satu dari kabupaten/kota yang menjadi prioritas utama penurunan angka stunting di Jawa Tengah. Hasil Pemantauan Status Gizi di tahun 2017 menyebutkan bahwa prevalensi stunting di Brebes mencapai 32,7% dan masuk ke dalam 10 besar kabupaten yang menjadi prioritas penanganan stunting di Indonesia, Satriawan (2018) dalam (Widyaningtyas, et al., 2021). Bupati Brebes Ibu Idza Priyanti dalam (jatengprov.go.id) mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil Pemantauan Status Gizi (PSG)

2017, data stunting yang ada di Kabupaten Brebes 32,7 persen. Dari tingginya angka tersebut, Kabupaten Brebes masuk dalam sepuluh besar kabupaten prioritas penanggulangan stunting dari 100 kabupaten di seluruh Indonesia yang akan diintervensi pada 2018.

Gambar 2. Prevalensi Balita Stunting Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2021



Sumber: Buku Saku Hasil SSGI, Tahun 2021

Berdasarkan laporan Hasil SSGI tahun 2021, Kabupaten Brebes memiliki angka prevalensi penanganan stunting sebesar 26,3 %, masuk dalam 3 besar angka prevalensi tertinggi setelah Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Tegal. Sedangkan data terbaru dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting bersama DP3KB Kabupaten Brebes pada Senin, 06 Juni 2022 menjelaskan bahwa pemerintah pusat sudah menargetkan penurunan angka stunting hingga belasan persen, sementara di Brebessendiri per Bulan Mei 2022 masih diatas 17 persen yang artinya masih berada diatas target nasional meskipun angkanya tidak setinggi pada tahun 2021 (kemenag.brebes.go.id).

Kecamatan Paguyangan adalah salah satu dari 17 kecamatan yang merupakan wilayah administratif di Kabupaten Brebes. Di Kecamatan Paguyangan terdapat dua puskesmas yaitu Puskesmas Paguyangan dan Puskesmas Winduaji. Wilayah cakupan Puskesmas Winduaji terdapat 5 desa yang memiliki angka stunting tinggi pada tahun 2021 meliputi Desa Kedungoleng, Desa Winduaji, Desa Wanatirta, Desa Pakujati, dan Desa Pandansari. Berikut disajikan jumlah kejadian anak stunting di Kecamatan Paguyangan dibawah ini:

Tabel 1. 1 Jumlah Kejadian Anak *Stunting* di Kecamatan Paguyangan

No	Nama Desa	Tahun	Jumlah Balita <i>Stunting</i>	Presentase
1	Kedungoleng	2021	81	13.78
2	Winduaji	2021	138	23.47
3	Wanatirta	2021	159	27.04
4	Pakujati	2021	88	14.97
5	Pandansari	2021	122	20.75

Sumber: Data Pemerintah Desa Winduaji, 2021

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah balita *stunting* di Desa Kedungoleng sebanyak 81 balita (13.78 %), Desa Winduaji sebanyak 138 (23.47%), Desa Wanatirta sebanyak 159 balita (27.04 %), Desa Pakujati sebanyak 88 balita (14.97 %), dan Desa Pandansari sebanyak 122 balita (20.75 %). Jumlah keseluruhan kejadian *stunting* di Desa Winduaji masih tinggi sebanyak 138 kasus pada tahun 2021. Winduaji memiliki kasus balita *stunting* terbanyak kedua diantara 5 desa setelah Desa Wanatirta. Berikut tabel sasaran dan kasus anak berdasarkan usia kasus *stunting* di Desa Winduaji:

Tabel 1. 2 Sasaran dan Kasus Anak Berdasarkan Usia Kasus *Stunting* di Desa Winduaji Tahun 2022

SASARAN	USIA								JUMLAH	%
	0-5 BLN		6-11 BLN		12-24 BLN		25-59 BLN			
	SANGAT PENDEK	PENDEK	SANGAT PENDEK	PENDEK	SANGAT PENDEK	PENDEK	SANGAT PENDEK	PENDEK		
1272	3	4	5	9	12	34	20	88	175	13.76

Sumber: Data Pemerintah Desa Winduaji, 2022

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah kasus anak *stunting* meningkat sebanyak 175 anak *stunting*. Analisis menunjukkan jumlah terbanyak kasus balita *stunting* terjadi pada usia 25-59 bulan dengan jumlah anak dengan postur pendek sebanyak 88 anak, dan sangat pendek sebanyak 20 anak. Pada usia 12-24 bulan atau disebut baduta dengan jumlah terbanyak kedua dengan jumlah anak dengan postur pendek sebanyak 34 anak dan sangat pendek berjumlah 12 anak. Data terbaru per bulan

Agustus 2022 dari data penimbangan serentak pada per Bulan Agustus 2022, Desa Winduaji memiliki jumlah angka *stunting* diatas Desa Wanatirta dan desa lainnya. Berikut jumlah Baduta *stunting* berdasarkan penimbangan serentak di Bulan Agustus:

Tabel 1. 3 Jumlah Baduta *Stunting* di Kecamatan Paguyangan Bulan Agustus 2022

No	Nama Desa	Tahun	Jumlah Baduta <i>Stunting</i>	Presentase
1	Kedungoleng	2022	17	8.02 %
2	Pakujati	2022	21	9.91 %
3	Pandansari	2022	58	27.36 %
4	Winduaji	2022	81	38.21 %
5	Wanatirta	2022	35	16.51 %

Sumber: Puskesmas Winduaji, 2022

Berdasarkan tabel diatas, Desa Winduaji memiliki jumlah angka *stunting* terbanyak yaitu sebesar 81 baduta (38.21 %). Disusul urutan kedua desa Pandansari sebanyak 58 baduta (27.36 %), dan ketiga yaitu Desa Wanatirta sebanyak 35 baduta (16.51 %), serta dua desa lainnya. Dengan data tersebut Desa Winduaji tentu memiliki masalah yang kompleks di Bidang Kesehatan yaitu pada penanggulangan *stunting* dalam rangka penurunan angka gizi buruk. Program yang telah diupayakan dalam penuntasan *stunting* di Desa Winduaji antara lain *Community Feeding Centre* (CFC) oleh Puskesmas Winduaji. *Community Feeding Center* yaitu suatu program berbasis masyarakat dengan pendekatan *colloboartive*. Adanya CFC di Desa Winduaji memiliki kegiatan satu bulan sekali diperuntukkan untuk 10 anak prioritas dengan anak usia dibawah 2 tahun. Pada setiap pertemuan, rangkaian agenda meliputi penyuluhan, pengolahan makanan tambahan (PMT), dan pemberian PMT berupa bahan pokok. CFC baru hanya ada di Desa Winduaji, karena jumlah angka kejadian *stunting* terbanyak dari 5 desa yang berada di bawah wilayah Puskesmas Winduaji.

Tabel 1. 4 Jumlah Anak *Stunting* Umur 11-23 Bulan Desa Winduaji yang Mendapatkan PMT

PUSKESMAS	BADUTA STUNTING UMUR 11-23 BLN		
	Jumlah	Jumlah Per Kecamatan	Jumlah DPT PMT
PAGUYANGAN	68		20

WINDUAJI	168	236	40
----------	-----	-----	----

Sumber: Puskesmas Winduaji, 2022

Keberadaan CFC merupakan Lembaga dibawah naungan dari Forum Kesehatan Desa (FKD) Desa Winduaji. FKD (Forum Kesehatan Desa) bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam melaksanakan seluruh program yang ada di Desa Winduaji tidak lepas dari peran dan partisipasi masyarakat. Untuk itu perlu peran masyarakat dalam mendukung terlaksananya program-program penanggulangan stunting atau wadah yang sudah ada salah satunya seperti CFC. Dalam teori partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007), dalam Haryono (2021), partisipasi masyarakat dalam pencegahan stunting sangat diperlukan, karena masyarakat akan ikut serta dalam proses pengidentifikasian masalah stunting, menggali potensi yang ada di masyarakat untuk membantu dalam pencegahan stunting, memberikan pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah stunting, turut serta dalam pelaksanaan upaya mengatasi masalah stunting dan masyarakat terlibat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi dalam pencegahan stunting. Solusi efektif yaitu dengan adanya kolaborasi dari berbagai unsur pemerintah, masyarakat dan swasta, bertujuan untuk meningkatkan standar kesehatan masyarakat desa. Untuk itu pemaparan tersebut menjadi alasan peneliti untuk meneliti bagaimana Peran *Community Feeding Center* (CFC) dalam penanggulangan *stunting* di Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes Tahun 2022.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai masalah sosial, mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial (Sugiyono, 2021). Alasan peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif adalah karena peneliti ingin mendeskripsikan secara detail dan mendalam keadaan yang diamati di lapangan dengan lebih spesifik dan transparan. Analisis data menggunakan

teori dan klasifikasi untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan dalam penanggulangan stunting Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. Alasan memilih tempat ini karena kejadian stunting di Desa Winduaji dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami kenaikan kasus, dimana pada tahun 2021 di Desa Winduaji terdapat 138 anak stunting, dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 175 anak. Alasan lain yaitu karena dari 5 desa yang ada di kecamatan paguyangan, Desa Winduaji adalah desa yang memiliki penduduk terbanyak yaitu mencapai 17.692 individu pada data tahun 2022. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif (B.Miles et al., 2014) dengan desain eksplanatori (Creswell & Creswell, 2018). Sasaran pada penelitian kali ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes (Dinas Kesehatan), Pemerintah Desa, Puskesmas, Kelompok Posyandu, Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) level desa dan TIM CFC Desa Winduaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan *Collaborative* Dalam Penganggulangan *Stunting*

Pendekatan *collaborative* merupakan kemitraan yang bersifat publik-swasta yang didasarkan pada inisiasi kolaborasi antara negara dan non negara, aktor komersial dan nirlaba yang telah muncul untuk berpartisipasi dalam suatu paradigma (O'Brien, 2012). Kolaborasi juga dapat merujuk pada proses pengambilan keputusan secara bersama-sama (John M. Bryson, et.al. (2014), sehingga dapat diartikan bahwa kolaborasi merupakan suatu hubungan kerjasama antar organisasi untuk mencapai tujuan bersama salah satunya keuntungan. Dengan hal itu, kepuasan dari didapatkan setiap pihak dalam suatu hubungan kolaborasi melalui prinsip karakteristik dari sebuah proses kolaborasi yang mengarahkan mereka pada hasil yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat (Gray, 2004). *Governance* merupakan kerangka konsep filosofis dari sebuah teori dan analisis yang dibangun sebagai landasan paradigma manajemen pemerintahan. Konsep *governance*

bukan hanya ditunjukkan pada orientasi internal melainkan pada aspek eksternal yang mewujudkan kemakmuran, keadilan bagi masyarakat (Budiaji, 2011). *Governance* dalam perspektif administrasi publik adalah proses penggunaan kekuasaan administratif, politik, dan ekonomi guna merumuskan proses kebijakan publik dan aktor - aktor yang terlibat di dalam proses pembuatan kebijakan (Irawan, D. 2017). Sehingga saat ini *governance* menjadi salah satu strategi di berbagai negara untuk melakukan perbaikan di berbagai aspek kenegaraan, yang kemudian menjadi cara untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*governance*).

Pelaksanaan *collaborative* sangat memerlukan fokus dan lokus yang mana kekuasaan bukan hanya terletak pada pemerintah saja, akan tetapi masyarakat atau rakyat juga memiliki kekuasaan dalam ikut serta penyelenggaraan pemerintahan (Rahmatunnisa, 2011). Pelaksanaan *collaborative* dalam pelaksanaannya, meliputi tiga domain utama yaitu negara atau pemerintah, masyarakat atau *civil society*, dan sektor swasta atau privat. Kemunculan *governance* merupakan paradigma yang digunakan untuk menggantikan *government* yang merujuk pada pemegang otoritas politik, sosial, ekonomi, dan administrasi kenegaraan (Plattner, 2013). Istilah *governance* secara khusus menggambarkan adanya perubahan peran pemerintah dari pemberi pelayanan kepada fasilitator dan perubahan kepemilikan dari negara kepada masyarakat. Pemerintah lebih adaptif dengan peran kekuasaan, norma, pengetahuan yang mampu membagi kewenangan secara adil dan setara (Fransen, Luc. 2015). Pusat perhatian utama dari *governance* adalah adanya memperbaiki kinerja dan perbaikan kualitas pelayanan yang diberikan oleh para aparatur. *Governance* diimplementasikan dalam beberapa tahapan, pertama sebuah proses baru dalam pemerintahan, kedua perubahan pada aturan, dan ketiga perubahan pada peran dan posisi masyarakat secara demokratis (Mardiyanta, 2011). Sektor swasta berperan dalam menciptakan lapangan kerja, dan masyarakat berperan dalam memfasilitasi interaksi secara sosial yang mampu memobilisasi individu atau kelompok untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, politik, dan administrasi pelayanan kenegaraan (Plattner, 2013). Keseimbangan komponen dalam *governance* akan membawa pengaruh besar terhadap terciptanya stabilitas politik, ekonomi, dan administrasi publik. Peningkatan hubungan yang berkaitan dengan

pertisipasi politik, yang mengeser pola pemerintahan lama menuju pola pemerintahan yang baru dan mampu mengubah model pemerintahan yang hirarki (Jordan et.al, 2005).

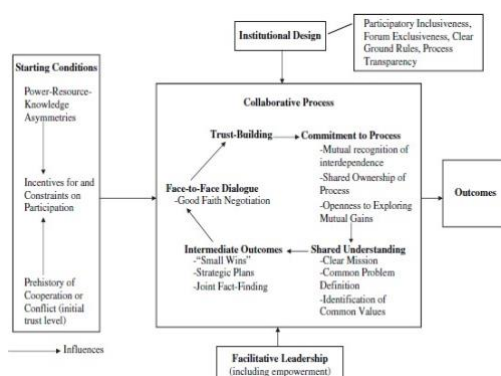
Konsep *governance* sendiri mempunyai tiga dimensi. Pertama ada dimensi kelembagaan, artinya *governance* adalah sebuah sistem administrasi yang harus melibatkan banyak pihak (multi stakeholders) baik dari pemerintah maupun di luar pemerintah. Kedua adalah dimensi nilai-nilai yang menjadi dasar dalam penggunaan kekuasaan yang mencakup efektifitas dan efisiensi. Sedangkan, yang ketiga dimensi proses yang berusaha untuk mendeskripsikan bagaimana lembaga memberi sebuah respon terhadap berbagai masalah publik (Fransen, 2015). Beberapa hal yang mempengaruhi pelaksanaan administrasi publik terkait dengan pendekatan *governance* Menurut (Singh, 2014). ada empat poin yaitu : Adanya dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya sehingga menuntut kemampuan pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Semakin banyaknya kebutuhan masyarakat yang tidak bisa diselenggarakan oleh pemerintah, sedangkan kemampuan masyarakat dan pasar semakin mampu mendorong kebutuhan masyarakat. Sehingga sebagian kebutuhan masyarakat banyak diselenggarakan oleh lembaga non pemerintah, globalisasi ekonomi yang semakin kuat memberikan tekanan kepada pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pembangunan dan perbaikan pelayanan publik diarahkan untuk mengurangi peran birokrasi yang selama ini dianggap inefisiensi. Dan mengurangi peran pemerintah dalam kegiatan yang sebenarnya bisa diselenggarakan oleh masyarakat, asosiasi dengan menggunakan mekanisme pasar yang bertujuan memperbaiki efisiensi nasional.

Selain itu, tata kelola kolaboratif adalah tata kelola kolaboratif yang diatur secara cermat dan terstruktur untuk menciptakan koordinasi antara publik untuk merumuskan kebijakan publik (Zeckhauser, 2011). Tata kelola kolaboratif merupakan bagian dari interaksi sistem hukum, namun di sini koordinasi juga dapat diartikan sebagai tindakan dan pedoman tindakan bagi lembaga negara dan swasta besar untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam jangka waktu tertentu. (Ansell, 2008). Menurut Ansell (2008), yang menyatakan bahwa desain institusional berpegang teguh pada protokol dasar dan aturan kolaborasi, legitimasi prosedur paling ditekankan

dalam proses kolaborasi. Proses kolaboratif menggambarkan pengembangan langkah demi langkah. Proses kolaboratif adalah proses dengan diskusi yang membutuhkan partisipasi para pemangku kepentingan yang pada akhirnya mengarah pada keputusan konsensus. Proses kolaboratif sebagai siklus meliputi dialog tatap muka, membangun kepercayaan, terlibat dalam proses, berbagi pemahaman, dan hasil antara. Semua tata kelola kolaboratif didasarkan pada dialog pribadi antara para aktor yang terlibat. Sebagai proses yang bertujuan pada konsensus, ini menciptakan peluang bagi para pemilik kepentingan untuk mengidentifikasi peluang untuk saling menguntungkan. Tentu saja, ketika seseorang berbicara, ada komunikasi. *Trust-building* atau saling percaya merupakan fase yang membantu membentuk proses saling pengertian antar pemangku kepentingan dalam rangka berjanji untuk melakukan kerjasama. Memahami pemangku kepentingan tersebut merupakan bagian dari membangun kepercayaan dalam kolaborasi antar pemangku kepentingan (Ansel, 2008).

Proses *collaborative governance* merupakan pendekatan atau model yang mencoba menguraikan suatu kondisi permasalahan yang bisa diselesaikan dengan adanya upaya sinergi atau kerjasama antar pihak. Proses ini harus dilalui dalam upaya mencapai satu pemahaman yang menjadi orientasi nilai yang akan dicapai. Dalam tahapan awal proses *collaborative governance* terdapat tiga tahapan utama, yaitu kondisi awal (Starting Conditions), kepemimpinan fasilitatif (Facilitative Leadership), desain kelembagaan (Institutional Design) dan proses kolaborasi yang terdiri dari berbagai komponen seperti, komunikasi, kepercayaan, komitmen, pemahaman bersama dan hasil sementara dalam capaian tujuan dimana masing-masing aspek berupaya memberikan gambaran dan analisis sebagai informasi awal dalam memahami permasalahan yang di hadapi terkait dengan upaya penurunan stunting di Kabupaten Brebes.

Gambar.3 Model Pendekatan *Collaborative*



Sumber: Chris Ansell and Alison Gash, 2008 Proses

collaborative merupakan pendekatan atau model yang mencoba menguraikan suatu kondisi permasalahan yang bisa diselesaikan dengan adanya upaya sinergi atau kerjasama antar pihak. Proses ini harus dilalui dalam upaya mencapai satu pemahaman yang menjadi orientasi nilai yang akan dicapai. Dalam tahapan awal proses *collaborative governance* terdapat tiga tahapan utama, yaitu kondisi awal (Starting Conditions), kepemimpinan fasilitatif (Facilitative Leadership), dan desain kelembagaan (Institutional Design), di mana masing-masing aspek berupaya memberikan gambaran dan analisis sebagai informasi awal dalam memahami permasalahan yang di hadapi.

1. Program Penanggulangan *Stunting* Melalui *Community Feeding Center (CFC)*

Salah satu masalah kesehatan yang sangat erat kaitannya dengan kemiskinan adalah gizi, apabila gizi tidak tercukupi akan menyebabkan gizi buruk (Shiyam, et al., 2022). Banyak faktor yang dapat menyebabkan kekurangan gizi (malnutrisi), yang sebagian besar berkaitan dengan asupan pola makan yang buruk, infeksi penyakit yang parah dan berulang, terutama pada masyarakat kurang mampu (Widyaningtyas, et al., 2021). Masalah-masalah tersebut umumnya dialami oleh masyarakat pedesaan, dimana akses informasi dan pola hidup yang masih sangat relatif sederhana, serta program pemerintah yang masih berjalan terhadap pemerataan pembangunan daerah. Awal mula kehidupan dimulai sejak kandungan ibu sampai dengan dua tahun adalah masa kritis dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Balita termasuk ke dalam *stunting* jika panjang ataupun tinggi badan menurut umur (PB/U atau TB/U) lebih kecil dari -2 Standar Deviasi. Standar dimaksud terdapat pada Kepmenkes No 1995/Menkes/SK/XII/2010 Tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak, (Sunaryo, Candradewini, & Arifianti, 2021) Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. Perpres ini bertujuan untuk percepatan perbaikan gizi masyarakat prioritas pada seribu hari pertama

kehidupan (Sunaryo, Candradewini, & Arifianti, 2021)

Stunting merupakan salah satu dari sekian banyak permasalahan gizi yang menjadi perhatian dunia. *Stunting* juga merupakan bagian dari tujuan yang ingin dicapai dalam *Sustainable Development Goal* (SDGs) sebagai wujud dari pembangunan berkelanjutan. *Stunting* termasuk kedalam bagian pembangunan berkelanjutan yaitu untuk menghilangkan segala bentuk malnutrisi atau kelaparan salah satunya dengan meningkatkan ketahanan pangan, menurut Rini dan Jeki, 2019 dalam (Febrian & Yusran, 2021). Program Penanggulangan *stunting* yang dilaksanakan pemerintah antara lain dengan membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK), Rumah Desa Sehat (RDS), dimana keduanya dibentuk oleh pemerintah desa dan *Community Feeding Centre* (CFC) yang dibentuk oleh puskesmas setempat. Oleh karena itu pemerintah mengupayakan efektifitas pelaksanaan program dengan strategi kemitraan dimana mengikuti strategi percepatan penurunan *stunting* dalam pelaksanaan RAN-PASTI melalui pendekatan intervensi gizi terpadu, pendekatan multisektor dan multipihak, dan pendekatan keluarga beresiko *stunting*.

Program yang telah diupayakan dalam penuntasan *stunting* di Desa Winduaji antara lain Rumah Desa Sehat (RDS) yang dibentuk oleh Pemerintah Desa Winduaji dan CFC oleh Puskesmas Winduaji. Rumah Desa Sehat atau RDS adalah sekretariat bersama bagi para pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan Desa di bidang kesehatan, yang berfungsi sebagai ruang literasi kesehatan, pusat penyebaran informasi kesehatan dan forum advokasi kebijakan di bidang kesehatan (ciptadesa.com, 2 Juli 2021, di akses pukul 10.30 WIB). RDS merupakan sebuah pusat kemasyarakatan (*community center*) yang memiliki fungsi sebagai ruang publik untuk urusan kesehatan di desa, untuk mendorong literasi kesehatan di desa, maupun mengadvokasi kebijakan pembangunan di desa (*stunting.go.id*, 2021). Sedangkan CFC atau *Community Feeding Center* yaitu suatu program berbasis masyarakat untuk memantau & mengatasi kondisi balita kurang gizi di lingkungannya dengan sasaran treatment Anak BGM (Bawah Garis Merah), Anak 2 T pada penimbangan rutin, Anak gizi buruk tanpa komplikasi, dan Anak gizi buruk pasca perawatan (<http://klayusiwalan-batangan.desa.id/>, 5 Juli 2022 Pukul 12.43 WIB). CFC di Desa Winduaji

memiliki kegiatan satu bulan sekali diperuntukkan ke 10 anak prioritas dengan anak usia 2 tahun kebawah. Di setiap pertemuan, rangkaian agenda meliputi penyuluhan, pengolahan makanan tambahan (PMT), dan pemberian PMT berupa bahan pokok. Pemerintah Desa Winduaji juga membentuk TPK atau Tim Pendamping Keluarga yaitu program baru yang bertujuan untuk penanggulangan *stunting* sejak dini berawal dari calon pengantin, ibu hamil, dan ibu pasca bersalin. Sasaran TPK juga ditunjukkan untuk meningkatkan program KB.

Dalam melaksanakan seluruh program yang ada di Desa Winduaji tentu tidak akan lepas peran dan partisipasi masyarakat. Untuk itu sangat perlu diadakan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung terlaksananya program-program penanggulangan *stunting* atau wadah yang sudah ada seperti RDS dan CFC. Dalam teori partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2000), dalam Haryono (2021), partisipasi masyarakat dalam pencegahan *stunting* sangat diperlukan, karena masyarakat akan ikut serta dalam proses pengidentifikasian masalah *stunting*, menggali potensi yang ada di masyarakat untuk membantu dalam pencegahan *stunting*, memberikan pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah *stunting*, turut serta dalam pelaksanaan upaya mengatasi masalah *stunting* dan masyarakat terlibat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi dalam pencegahan *stunting*. Partisipasi masyarakat sendiri yaitu keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi (Norsanti. 2021). Partisipasi masyarakat tidak terpisahkan dengan pemberdayaan masyarakat, dimana pemerintahan khususnya pemerintah desa setempat berupaya memaksimalkan peran masyarakat di berbagai bidang dalam hal ini ikut serta dan menjadi subjek, bukan hanya menjadi objek adanya program pemerintah dalam bidang kesehatan khususnya dalam program penanggulangan *stunting*.

2. Proses Kolaborasi Penanggulangan Stunting Di Desa Winduaji (*Collaboration Process*)

Menurut (Ansell dan Gash, 2008) Proses kolaboratif sebagai siklus meliputi, dialog bertatap muka (*face to face dialogue*), lalu membangun

kepercayaan (*trust building*), juga komitmen terhadap proses (*commitment to process*), berbagi pemahaman (*shared understanding*), dan hasil sementara (*intermediat outcomes*). Proses *collaborative governance* dalam penurunan *stunting* di Kabupaten Brebes dapat diketahui dari masing-masing aspek dalam proses *collaborative*. Pertama proses *face to face dialog* atau dialog tatap menjadi hal yang sangat penting, dimana pihak yang terlibat dalam dialog tatap muka harus mampu melibatkan berbagai *stakeholder* yang memiliki kompetensi bidang dan keahlian terhadap masalah yang dihadapi. Berikut adalah penjelasan terkait dengan pihak yang terlibat dalam dialog tatap muka dan intensitas dialog antar *stakeholder* yang berlangsung selama proses *collaborative goveance* dalam penurunan *stunting* di Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes dilakukan dengan beberapa tahap. Pertama adanya forum diskusi lintas sektor dari pemerintah desa sampai dengan pemerintah daerah dan bersama stakeholders, dalam hal ini Dinas kesehatan, puskesmas, kelompok posyandu, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) level desa dan kelurahan, praktisi akademisi (Poltekkes) dan pihak swasta (Dexa Group). Kedua, adanya kajian ilmiah dan diskusi publik untuk melakukan pemetaan wilayah pedesaan yang memiliki angka *stunting* yang tinggi kemudian melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak pemerintah desa atau kelurahan setempat untuk memperoleh informasi secara akurat. Sehingga dengan adanya dialog dan komunikasi seperti ini akan mampu memperoleh informasi dan mampu menemukan berbagai alternatif yang mampu untuk menurunkan angka *stunting* di Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes.

Kedua, proses *trust building* merupakan tahapan yang berupaya dalam membangun kesamaan visi dan orientasi yang menumbuhkan rasa saling percaya antar pihak dalam penanganan ataupun penyelesaian suatu permasalahan yang dihadapinya. Upaya dalam membangun kepercayaan diantara *stakeholder* yang terlibat menjadi sesuatu yang penting untuk diperhatikan dalam proses *collaborative governance*. Artinya, para pihak pemerintah, masyarakat, dan swasta sama-sama memiliki sistem kepercayaan yang sama dalam mencapai satu tujuan. Dari proses *collaborative governance* dalam upaya percepatan penurunan *stunting* di Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes sudah terjalin sistem

kepercayaan antar pihak. Hal ini dikarenakan dari awal proses upaya penanggulangan *stunting* di Kabupaten Brebes pihak pemerintah sudah melibatkan berbagai aktor baik dari pihak masyarakat dan swasta. Selain itu, adanya kordinasi yang rutin dilakukan dari level desa/kelurahan, kecamatan sampai dengan tingkat kabupaten sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Proses *collaborative governance* yang dilakukan sama-sama bertujuan untuk menciptakan masyarakat Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes yang sehat tanpa *stunting* yang menguntungkan semua pihak. Selain itu, adanya sistem kepercayaan yang dibangun oleh masyarakat kepada pihak pemerintah desa sampai dengan daerah dalam penanganan permasalahan *stunting* yang berdampak pada dukungan oleh semua pihak masyarakat.

Ketiga, *commitment to process* merupakan proses yang harus dilaksanakan dalam proses *collaborative governance*. Komitmen menjadi kunci utama dalam mencapai keberhasilan dari setiap program pemerintah untuk mendapat dukungan baik masyarakat maupun para *stakeholders*. Komitmen yang dibangun dalam proses *collaborative governance* bertujuan untuk mencapi harapan yang telah di tetapkan sebagai agenda kebijakan pemerintahlingkup nasional umumnya. Dalam upaya penanggulangan dan penurunan *stunting* di Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes, dilakukan dari mulai awal pemerintah melibatkan masyarakat dan pihak swasta dengan adanya komitmen dalam bentuk MOU antara pemerintah desa dan Kabupaten Brebes. Sedangkan untuk kelompok masyarakat, pemerintah melalui kelompok posyandu yang ada di desa dan kelurahan memberikan surat tugas atau SK secara legal, sehingga pelaksanaan program penanggulangan dan penurunan *stunting* dilaksanakan secara sistematis dan komitmen dari masing-masing pihak. Pihak swasta dan parktisi akademik secara umum berperan sebagai edukasi dan penggerak pola makan, pola asuh serta perhatian terhadap higienis, sanitasi dan air bersih terhadap anak yang masih dibawah rata-rata usia.

Keempat, *shared understanding* merupakan upaya dalam membangun rasa saling memahami di antara aktor/pihak yang terlibat dalam proses *collaborative governance*. Sikap saling memahami ini dilakukan untuk saling memberikan keterbukaan informasi, kesamaan visi dan misi untuk mencapai

alternatif dari masalah yang dihadapi. Dengan upaya penanggulangan *stunting* di Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes, terlihat dari masing-masing pihak baik pemerintah desa maupun daerah, masyarakat dan swasta saling memahami mengenai perwujudan tujuan yang akan dicapai. Hal ini, yang menjadi daya dukung dan keterlibatan lingkungan masyarakat dan pihak swasta untuk saling membantu pemerintah desa dan daerah dalam menangani masalah *stunting* yang dihadapi. Permasalahan *stunting* ini tidak bisa hanya diselesaikan atau ditangani oleh pemerintah saja dan memerlukan jangka waktu yang bertahap, tetapi pemerintah memerlukan dukungan dari berbagai pihak, dengan adanya kesadaran itu langsung terbangun sikap saling memahami yang selama ini sudah berjalan dalam penanggulangan masalah *stunting* di Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes.

Kelima, *intermediate outcomes* merupakan tahapan untuk mengetahui hasil sementara yang dilakukan dalam proses *collaborative governance*. Hasil sementara ini memberikan informasi terkait capaian yang sudah dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam penanggulangan dan penurunan *stunting* di Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. Mengenai hasil sementara dalam penanggulangan dan penurunan *stunting* di Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes sudah terjalin alur komunikasi dan koordinasi yang cukup baik, antara pemerintah, masyarakat dan para pihak swasta. Adanya forum-forum yang dilakukan di semua level baik desa maupun daerah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menanggulangi *stunting*. Adanya dukung edukasi dan pengetahuan dari pihak *Dexa Group* dan Poltekkes sebagai bentuk tanggung jawab sosial melalui Sosialisasi penanganan *Stunting* untuk digunakan dalam meningkatkan kesadaran pentingnya edukasi, pengetahuan dan mutu pangan maupun gizi bagi kelompok masyarakat dan anak-anak balita mengenai pola asuh, pola makan dan pengetahuan mengenai pangan yang bermutu dan bergizi yang diperuntukan oleh seluruh masyarakat secara khusus untuk meningkatkan perbaikan pada kesehatan gizi dan pangan. Masyarakat melalui program posyandu dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Brebes juga sudah membentuk gerakan sehat dan gerakan memberantas permasalahan *stunting* yang juga di dukung oleh

pemerintah desa, pemerintah kabupaten, kelompok masyarakat, praktisi akademi dan para pihak swasta sebagai unsur *stakeholders*.

Keenam, dalam proses *collaborative governance* berupaya untuk mengukur keberhasilan atau hasil yang dikenal dengan *outcomes*. Hasil dari proses pelaksanaan *collaborative governance* dalam penanggulangan dan penurunan *stunting* di Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes saat ini bis dibilang cukup maksimal dan pemerintah cukup masif dalam melakukan gerakan Brebes bebas dari permasalahan *stunting*. Penanggulangan dan penurunan angka *stunting* di Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes dilakukan cukup signifikan dengan berbagai upaya sebagai perwujudan langkah antisipasi dan penurunan angka *stunting* secara nyata. Kondisi awal *stunting* yang mencapai 24,4% persen, pada tahun 2021 perkembangan *stunting* di cukup signifikan mengalami penurunan cukup signifikan yaitu menurun menjadi sebesar 18,40 Pd Thun 2022. Artinya, target pemerintah menurunkan angka *stunting* 2,5 persen setiap tahun membuahkan hasil yang melebihi target yang ditetapkan. Hal ini tentunya tidak lepas dari adanya usaha dan dukungan bersama berbagai pihak yang sampai saat ini memiliki kepedulian, kesadaran dan komitmen untuk bersama-sama menanggulangi dan mengurangi permasalahan *stunting* di Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes.

KESIMPULAN

Peran Community Feeding Center (CFC) Dalam Penanggulangan Stunting Di Desa Winduaji melalui pendekatan *collaborative governance* mampu menanggulangi *stunting* di Desa Winduaji., masyarakat dan berbagai pihak bersama-sama bersinergi mengurangi angka *stunting* dan mencegah peningkatan *stunting*. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui secara komperhensif bahwa peran *Community Feeding Center* (CFC) melalui proses kolaboratif yang dilakukan sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek, pertama pemerintah secara terbuka melibatkan unsur masyarakat dan swasta dalam awal penyusunan program kerja dalam penanggulangan dan penurunan angka *stunting* di Desa Winduaji. Kedua, pemerintah selalu berupaya secara penuh untuk memberikan fasilitas dan keterbukaan akses informasi dalam upaya pemetaan dan langkah strategis dari level pemerintah desa, kelurahan,

kecamatan agar terencana secara sistematis dan sinergis. Ketiga, adanya forum komunikasi dan berbagai kegiatan yang melibatkan berbagai pihak dalam menggali dna menemukan solusi alternatif yang paling efektif dan efisien dalam penanggulangan dan penurunan kasus *stunting* di Desa Winduaji. Keempat, pemerintah memiliki komitmen untuk melakukan kerjasama dalam bentuk MOU dengan pihak *Dexa Group* dan akademisi Poltekes serta pihak kelompok masyarakat yang tergabung dalam kelompok posyandu dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Peranan *Community Feeding Center* (CFC) menjadi sangat penting dan strategis, dimana keberadaan *Community Feeding Center* (CFC) mmpau membangun berbagai jejaring lintas stakeholders dalam upaya penanggulangan dan pencegahan stunting yang ada di Desa Winduaji saat ini

REFERENCES

- Ansell, Chris, and Gash, Alison. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory, Published by Oxford University Press.
- Ashworth, R. E., McDermott, A. M., & Currie, G. (2019). Theorizing from Qualitative Research in Public Administration: Plurality through a Combination of Rigor and Richness. Journal of Public Administration Research and Theory, 29(2). <https://doi.org/10.1093/jopart/muy057>
- B.Miles, M., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis - Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, Johnny Saldaña - Google Books. In Sage Publications.
- Budiaji. (2011). Good Governance dalam Pemerintah Daerah.Vol. 28, No. 2. Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung. Hal 201.
- Creswell, & Creswell. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches - John W. Creswell, J. David Creswell - Google Books. In SAGE Publications, Inc.
- Haryono, D., & Marlina, L. (2021). Partisipasi Masyarakat pada Pencegahan Stunting di Desa Singaparna Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. The Indonesian Journal of Politics and Policy.
- Irawan, D. (2017). Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya). Kebijakan Dan Manajemen Publik, 5(3), 1–12. <http://sits.dishub.surabaya.go.id/ver2/berita>
- Isbandi Rukminto Adi. Kesejahteraan sosial (Pekerjaan sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2013.
- Gray, Barbara. (2004). Collaborating: Finding common ground for multi-party problems. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- John M. Bryson, et.al. (2014). Public Value Governance: Moving Beyond Traditional Public Administration and the New Public Management. Public Administration Review, Vol. 74, Iss. 4, pp. 445–456, The American Society for Public Administration. University of Minnesota
- Jordan, Andrew et.al. (2005). The Rise of ‘New’ Policy Instruments in Comparative Perspective: Has Governance Eclipsed Government. POLITICAL STUDIES: Vol 53, 477–496. Published by Blackwell Publishing Ltd, 9600 Garsington Road, Oxford OX4 2DQ, UK and 350 Main Street, Malden, MA 02148, USA.
- Mardikanto, & Soebiato. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Mardiyanta, Antun. (2011). Kebijakan Publik Deliberatif: Relevansi dan Tantangan Implementasinya (Pergeseran Orientasi Ilmu Administrasi Publik dari Government ke Governance). Volume 24, Nomor 3. Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Airlangga.
- Morgan, D. L. (2017). Integrating Qualitative and Quantitative Methods: A Pragmatic Approach. In Integrating Qualitative and Quantitative Methods: A Pragmatic Approach. <https://doi.org/10.4135/9781544304533>
- Nathan, A. J., & Scobell, A. (2012). Experience sampling method :Measuring the quality of everyday life. In Foreign Affairs (Vol. 91, Issue 5).

- Norsanti. (2021). Efektifitas Program Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Batumadi Kabupaten Balangan (Studi Kasus pada Desa Mampari dan Desa Banua Hanyar). *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*.
- O'Brien, M. (2012). *Review of Collaborative Governance: Factor Crucial to the Internal Workings of the Collaborative Process*. Published by the ministry for the environment.
- Ospina, S. M., Esteve, M., & Lee, S. (2018). Assessing Qualitative Studies in Public Administration Research. *Public Administration Review*, 78(4), 593–605. <https://doi.org/10.1111/puar.12837>
- Plattner, Marc F. (2014). *Reflections on "Governance"*. *Journal of Democracy* Volume 24. National Endowment for Democracy and The Johns Hopkins University Press.
- Putri, E. N., & Nurcahyanto, H. (2021). Collaborative Governance dalam Penanggulangan Stunting di Desa Kalirandu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang. *Journal Of Public Policy And Management Review*. doi:10.14710/jppmr.v10i2.30594.
- Widyaningtyas, et.al (2021). *Program Siaga Stunting Terintegrasi Aplikasi Pintar*

Sumber Lain:

- Peraturan Bupati (PERBUB) Kabupaten Brebes Nomor 30 Tahun 2022, Peran Desa dalam Konvergensi Pencegahan Stunting.
- Prevalensi Balita Stunted (Tinggi Badan Menurut Umur) Berdasarkan Umur, SSGI 2021. Dikutip dari Retrieved from <https://www.kemkes.go.id/> di akses pada hari sabtu 12 Agustus 2023.